

## DAFTAR REFERENSI

### A. Buku

- Abdulkadir, Muahammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2014.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Darus, M Luthfan Hadi. *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Cetakan I. Bandung: Alfabeta, 2017.
- K., I Made Hendra. 2021. *Problematik Notaris dalam Praktik*. Bandung: Alumnii.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: PT. Rineke Cipta, 2008.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Pers. Cetakan I. Mataram: Mataram Universiy Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004.

- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center of Documentation and Studies of Business Law, 2003.
- Notodisoerjo, Soegondo R. *Hukum Notarial Di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Perangin, Effendi. *Hukum Agraria Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktis Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1975.
- Riza, Faisal. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT. Rajawal Buana Pusaka, 2020.
- Rusli, Tami. *Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing, 2012.
- Satrio J., 1993, Perikatan Yang lahir Dari Undang-Undang-bagian pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 44.
- Schut, Mr. G.H.A., 1985, Onrechtmatige daad volgens BW en NBW, Tjeenk Willink Zwolle, Hal 43.
- Setiawan, 1992, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, Hal 37.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sulihandari, Hartanti, dan Nisya Rifani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Weni, Sri Mustika, Sri Turatmiyah, dan Sri Handayani. "Pemberian Kuasa Mutlak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Dikaitkan Dengan Instruksi Menteri

Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Surat Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.” Sriwijaya University, 2020.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

## **B. Jurnal**

- Afifah, Kunni. “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya.” *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017).
- Al Hadid, U. M. “Keabsahan Surat Kuasa Jual Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang yang Dibuat Secara Notariil Akta di Hadapan Notaris.” *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019) Hal. 65–76.
- Alfianto, Dwi, Ali Rido, dan Geraldo Valento Wijaya. “Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 6.
- Ardianti, M., dan I. G. A. K. R. Handayani. “Penyalahgunaan Wewenang Penerima Kuasa dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah dan Kuasa Menjual (Putusan Nomor: 173/K/Pdt/2012).” *Jurnal Repertorium* 5, no. 1 (2018).
- Arianto, Clara Vania. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan Akibat Adanya Penggunaan Kuasa Mutlak Dalam Jual Beli Tanah”. *Notary Journal* 1, no. 2 (October 27, 2021): 182–200.
- Arifah, Lainul. Kedudukan Hukum terhadap Penggunaan Kuasa Mutlak dalam Pemindahan Hak atas Tanah di Kantor Notaris/PPAT Paulus Manaek Simbolon. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Aulia, Via, dan Harsanto Nursadi. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta PPJB

Dengan Merumuskan Pemberian Kuasa Mutlak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/PDT.G/2019/PN.KRS).” *PALAR | Pakuan Law Review* 8, no. 1 (2022).

Carpenter, Charles E. “The Doctrine of Res Ipsa Loquitur.” *The University of Chicago Law Review* 1, no. 4 (1934).

Fahrel Faadhilah Wiramansyah, et.al, Kepastian Hukum Surat Kuasa Mutlak dalam Hal Tanah sebagai Objek Hak Tanggungan.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2024).

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Ginting, N. M. “Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Hibah yang Dilakukan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Bit).” *Indonesian Notary* 1, no. 2 (2019).

Hakim, Aulia Rahman, dan Muhammad Fajar Ilham. “Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban PPAT Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Dengan Penggunaan Kuasa Mutlak.” *Yustitiabelen* 9, no. 2 (2023).

Helmi, Nurul, Teuku Yudi Afrizal, dan F Fatahillah. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kuasa Menjual Mutlak Dalam Transaksi Jual Beli Tanah.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 1 (2021).

Helmi, Nurul. A., Teuku Yudi. Fatahillah. 2021. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kuasa Menjual Mutlak dalam Transaksi Jual Beli Tanah”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH, Vol. IV, No. 1*.

- Indriani, Dewi, Berliana Ayu Saputri, Bhim Prakoso, dan Aan Efendi. “Kekuatan Hukum Surat Kuasa Mutlak Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah.” *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 7 (2023).
- Lestari, G D. “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Perjanjian Kredit Yang Tidak Sesuai Dengan Offering Letter.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2020).
- Maimanah, Zahra Amalia, dan Shalman Al-Farazi. Penerapan Penggunaan Larangan Surat Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Monika, Della. “Analisis Yuridis Eksistensi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perspektif Pendaftaran Tanah Di Kecamatan Tanjungpinang Timur.” *Jurnal Selat* 7, no. 1 (2020). Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Natalia, R E, dan E A Priyono. “Keabsahan Akta Jual Beli Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak Tanpa Sepengetahuan Penjual.” *Notarius* 18, no. 3 (2025).
- Reswari, Gedion Ardana. “Surat Kuasa Mutlak Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah”. *JURNAL RECHTENS* 3, no. 1 (June 30, 2014).
- Setiawan, I Ketur. “Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Kuasa Mutlak Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kerap Kali Menimbulkan Masalah Dalam Praktik.” *National Journal of Law* 2, no. 1 (2020).
- Setiawan, Rachmad, 2005, *Hukum Perwakilan dan Kuasa Cet. I*. Jakarta: PT Tatanusa

Widiyastuti, Y. Sari Murti. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.

Yanti, Yosita Erva, dan Agus Trisaka. “Peralihan Hak Tanah Menggunakan Akta Kuasa Mutlak: Tindak Lanjut Perjanjian Pengikatan Jual.” *Repertorium: Jurnal Kenotariatan* 12, no. 2 (2023).

Yosita Erva, Y., dan Agus Trisaka. “Peralihan Hak Tanah Menggunakan Akta Kuasa Mutlak: Tindak Lanjut Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 2 (2023).

### **C. Internet**

Ramdhan, Andi, dan Adi Saputra. “Yurisprudensi Larangan Surat Kuasa Mutlak Dalam Jual Beli.” *MARINews*. Last modified 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/yurisprudensi-larangan-surat-kuasa-mutlak-dalam-jual-beli-0wj>.

Siregar, Pasa Deda. “Konsep Dan Praktik Strict Liability Di Indonesia.” Jakarta: Hukumonline.com, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8/>.

### **D. Putusan**

Putusan MA Nomor 731 K/Sip/1975

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2001